

DAFTAR PUSTAKA

- Andriawan, J. (2020). Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Skripsi.
- Aryanti, L. (2022). Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Nagari Lansek Kadok Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Institut Agama Islam Negeri Batusangkar : Batusangkar.
- Delila. 2021. *Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Lobu Rampah Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara*. Skripsi. Universitas muhammadiyah sumatera utara.
- Farida, vilmia, a. Waluya jati, dan riska harventy. 2018. *Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Di Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang*. Jurnal Akademi akuntansi, 1(1), 66.
- Garung, C. Y., & Ga, L. L. (2020, Maret). *Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pencapaian Good Governance Pada Desa Manulea, Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka*. Akuntansi, 8(1), 19-27.
- Hamid, alfian. 2016. *Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Pencapaian Good Governance (Studi Empiris Di Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa)*. Skripsi. universitas negeri alaaddin makassar.
- Hardiningsih, P., Oktaviani, R. M., & Srimindarti, C. (2019). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa menuju Good Government Governance. Jurnal Stie Semarang, 2(3).
- Humas, setkab. 2022. Pemanfaatan dana desa tahun 2021 dan prioritas pemanfaatan dana desa tahun 2022 <https://setkab.go.id/pemanfaatan-dana-desa-tahun-2021-dan-prioritas-pemanfaatan-dana-desa-tahun-2022> (diakses tanggal 19 september 2022).
- Labangu, Y. L., Anto, L. O., & Nurhayati. (2022, Oktober). *Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Pada Desa Labulu-labulu Kecamatan Parigi Kabupaten Muna*. Akuntansi dan Keuangan (JAK), 7(2), 223-235.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 20, 24, 35, 37, 38 dan tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang cara pengelolaan, penyaluran, penggunaan, pemantauan, dan evaluasi Dana Desa.

Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014, pasal 1 ayat 9 tentang Alokasi Dana Desa (ADD).

Riyanto, L. A., Afifuddin, & Widodo, R. P. (2021). Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Alokasi Dana Desa dalam Mewujudkan Good Governance (Studi Kasus di Kantor Pemerintah Desa Bendoroto, Kecamatan Munjungan). *Jurnal Respon Publik*, Vol. 15, No. 2, 29-39.

Safitri, teti anggita dan rigel nurul fathah. 2018. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Governance*. *Jurnal litbang sukowatino*, 2(1), 89-105.

Sari, Y. (2022). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pencapaian Good Governance (Studi Kasus Desa Bone Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa). Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Muhammadiyah Makassar : Makassar.

Sutisna, szahra aisyah dan dini widyawati. 2022. *Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Pada Desa Jabaran Kecamatan Balongbendo)*. *Jurnal ilmu dan riset akuntansi*, 11(10).

Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa